



Peran Partai Politik Pemilu dalam Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani di Indonesia

Irfan Azim
(Institut Elkatarie)

Jun Mawalidin
(Institut Elkatarie)

irfanazim@gmail.com, joenjun98@gmail.com,

Abstract

That is in the study of observations about the role of political parties (Political Parties) to civil society in the country of Indonesia. Political parties in Indonesia greatly color the development of democracy in Indonesia. This is very easy to understand, because political parties are a picture of the face of the role of the people in national political regulations or in other words a reflection of the level of political participation of the people. In countries that embrace democracy such as Indonesia, the idea of popular participation has an ideological basis that the people have the right determine public policy. That political party has always been synonymous with power. This means that if you want to achieve power, you need tools to achieve this goal through political parties. Political parties as a container of society in a form of community collectivity in politics through organizational forms that have structure and leadership. Therefore, political parties are indispensable in the democratic system as a form of institutionalization of democracy. The role of political parties in this writing as a tool to educate the people of Indonesia in doing good with state facilities by channeling it as the rules and authority given. Political parties as parties that are part of the Indonesian democratic process should not be eliminated because it has become the basis of the state or the written constitution of the state.

Keywords : Political Party, Society, Democracy, Indonesia.

Abstrak

Bahwasanya dalam kajian pengamatan tentang peranan dari partai politik (Parpol) menuju masyarakat yang madani yang ada di Negara Indonesia ini. Partai Politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik sebagai suatu gambaran wajah peran rakyat dalam aturan-aturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk menentukan kebijakan umum (public policy). Bahwa partai politik selalu identik dengan kekuasaan. Artinya jika ingin meraih sebuah

kekuasaan, maka perlu alat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui partai politik. Partai politik sebagai wadah masyarakat dalam merupakan bentuk kolektivitas masyarakat dalam berpolitik melalui bentuk organisasi yang mempunyai struktur dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik sangat diperlukan dalam sistem demokrasi sebagai wujud pelembagaan demokrasi. Peran dari partai politik bahwasanya dalam penulisan ini sebagai alat untuk mendidik masyarakat Indonesia dalam berbuat baik dengan fasilitas negara dengan menyalurkannya sebagaimana aturan dan kewenangan yang diberikan. Partai Politik sebagai partai yang jadi bagian dari proses demokrasi Indonesia hal itu tidak boleh dihilangkan karena sudah menjadi dasar negara atau konstitusi tertulis negara.

Kata Kunci : Partai Politik, Masyarakat, Demokrasi, Indonesia

Pendahuluan

Sejarah perkembangan partai politik Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam peraturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi masyarakat di dasari pada pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng.¹

Partai politik dipahami sebagai suatu tipe organisasi politik yang berupaya untuk mempengaruhi, atau secara keseluruhan berfungsi sebagai pemerintah yang mengerjakan kebijakan politik; biasanya dengan cara menominasikan kandidat-kandidat mereka sendirian dan menundukan mereka pada posisi tertentu (di eksekutif). Parpol berpartisipasi dalam kampanye pemilu, melakukan sosialisasi dengan publik/konstituen, dan mengkritik tindakan atau keputusan pemerintah. Parpol seringkali mendukung satu posisi ideologis, atau visi, yang diwujudkan dalam program partai, serta dipertegas oleh suatu platform tertulis dengan tujuan-tujuan khusus, membentuk koalisi di antara kepentingan-kepentingan politik yang berbeda.²

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm 161

² Laporan Penelitian INFID No. 3/2014, *Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia*, (Studi Kerjasama INFID dan LIPI, 2014).

kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.³

Sebagai subyek penelitian ilmiah. Partai politik tergolong relative muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Sarjana-sarjana yang berjasa menelopori antara lain adalah M. Ostrogorsky (1902), Robert Michels (1911), Maurice Duverger (1951), dan Sigmund Neumann (1956). Setelah itu, beberapa sarjana behavioralis, seperti Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungannya dengan pembangunan politik. Kedua sarjana ini kemudian menuangkan pemikiran dan hasil studinya dalam bukunya yang berjudul *Political Parties and Political Development* (1966). Di samping itu G. Sartori dengan bukunya *Parties and Party System: A Framework for Analysis* (1976) merupakan ahli lebih kontemporer yang terkenal.⁴

Di bidang politik, Alfian menjelaskan pembangunan dan pembaruan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan. Pengertian pertama ialah adanya suatu sistem yang ideal yang ingin dicapai. Kedua ialah penilaian bahwa system politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena itu perlu diperbaiki atau diperbarui. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini system politik ideal yang diingiinkan itu ialah Demokrasi Pancasila. Lebih lanjut Kaelan menjelaskan pembangunan dan pengembangan harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subyek negara. Oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk meralisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.⁵

Kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang diwakili oleh tata kelola partai politik masih jauh dari keadaan yang ideal. Pertama, partai politik yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik masih harus terus berproses dalam menjalankan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kedua, partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama. Pendidikan politik seakan tenggelam di antara hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Eksklusivitas dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sentralisme partai politik yang mengabaikan kontrol anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi di kalangan kandidat dan elitte partai politik.⁶

Organisasi yang berperan dalam proses formulasi kepentingan antara lain adalah sektor perantara (*intermediary sector*) dan masyarakat madani (*civil society*). Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan system politik mereka. Contohnya adalah sekelompok kepentingan seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 397.

⁴ Ibid., hal 397.

⁵ Arif Prasetyo Wibowo dan Cecep Darmawan, Peran Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Wahana Pendidikan Politik Guna Mengembangkan Nilai-nilai Pancasila, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*; Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Vol. 08 No. 01, 2021.

⁶ Ibid.,

profesi, kelompok inisiatif warga dan organisasi keagamaan. Sedangkan dalam masyarakat madani muncul berbagai macam inisiatif yang berkisar pada tujuan dan masalah tertentu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, gender, dan lain-lain. Salah satu perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani adalah kelompok kepentingan hanya melayani kepentingan klien mereka saja. Sedangkan masyarakat madani diharapkan merangkul kepentingan masyarakat bersama yang lebih umum.⁷ Peranan masyarakat madani sebagai kelompok social yang diatur oleh pemerintah untuk berperan aktif sebagai makhluk social dengan jaminan social.

Metode Penelitian

Pada penelitian karya ilmiah ini, bahwa peneliti menggunakan penelitian hukum secara normatif terhadap suatu kegiatan partai politik dalam membentuk kader dan juga masyarakat dengan cara pendidikan politik yang dibuatnya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara konseptual atau sejenis kajian pustaka (*library research*), yaitu suatu kajian terhadap data kepustakaan yang di mana terkait dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Peranan dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Partai Politik

Partai Politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Beberapa contoh definisi yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer.⁸

Carl J. Friedrich menuliskanya sebagai berikut:

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kebermanfaatan yang bersifat idiil serta materil (*A Politcal, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintanning for its leaders*

⁷ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012).

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 403-404.

the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages). Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁹

Dalam terminologi peraturan perundang-undangan partai politik seperti dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, definisi partai politik adalah:

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Definisi sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa partai politik selalu identik dengan kekuasaan. Artinya jika ingin meraih sebuah kekuasaan maka perlu alat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui partai politik. Partai politik sebagai wadah masyarakat dalam merupakan bentuk kolektivitas masyarakat dalam berpolitik melalui bentuk organisasi yang memunyai struktur dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik sangat diperlukan dalam sistem demokrasi sebagai wujud pelembagaan demokrasi dalam negara demokrasi.¹⁰

Partai Politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah yang merupakan gerakan partaui politik tertutup, sedangkan Sarekat Islam, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia merupakan partai terbuka. Pada dasarnya, semua partai politik yang ada merupakan personifikasi keragaman budaya politik di Indonesia, yang dilahirkan melalui kebudayaan multipartai.¹¹

Kelompok kepentingan dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainya. Peran penting ini mendudukan parpol di posisi pusat (*political centrality*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:¹²

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian *mentransformasikanya* menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam *legislasi* dan *implementasi* program kebijakan publik itu.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 404.

¹⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal 153.

¹¹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2009), hal 299.

¹² Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Friedrich-Ebert-Stiftung ((FES)). 2012.

2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan public yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi daerah maupun nasional.

Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah system demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam *pranata* system politik. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses *dari bawah ke atas* sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka di banyak negara terdapat *pendanaan publik* bagi parpol. Penyaluran dana public tersebut bisa ikut mengawasi anggaran parpol. Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa parpol berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik.¹³

Keberadaan Partai Politik diatur dalam legalitas hukum dan kehendak pembentuknya merupakan jaminan hak warga negara. Kehadiran partai politik sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. berdasarkan teori yang telah banyak diterima secara luas bahwa infrastruktur politik terdiri atas komponen-komponen:¹⁴

1. Partai politik (*political party*),
2. Kelompok kepentingan (*Interest group*),
3. Kelompok penekan (*pressure group*),
4. Media komunikasi politik (*Polical communication media*),
5. Tokoh politik (*political figure*).

Partai Politik memiliki peran penting di dalam demokrasi negara, adapun penjelasan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1), Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2), Anggaran Dasar partai politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar partai politik. 3), Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. 4), Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5), Keuangan partai politik adalah semua hak dan

¹³ Ibid.,

¹⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang , berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. 6, Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

B. Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau Civil Society dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreatifitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif menuju cita kehidupan yang telah disepakati bersama-sama, serta diatur oleh norma hukum yang kuat lepas dari pengaruh kelompok atau kekuatan orang tertentu.

Dawan Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya dalam masyarakat madani warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara, kemudian rahardjo menjelaskan dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindari diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.¹⁶

Ubaedillah dan Abdul Rozak, mengemukakan ada beberapa karakteristik masyarakat madani yaitu:¹⁷

1. Wilayah Publik yang Bebas, Free Public Sphere adalah ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Persyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas lebih lanjut dikatakan bahwa ruang public secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.
2. Demokrasi merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat, diaman dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama.
3. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁶ Majid, Nurcholish, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Makalah Seminar IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.

¹⁷ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICEF UIN Syarif Hidayatullah Prenadamedia Group, 2016).

oleh kelompok masyarakat yang lain berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan ajaran yang benar.

4. Pluralism (kemajemukan) merupakan satuan prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralism harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatacara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari pluralism tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralism itu sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.
5. Keadilan sosial merupakan keadilan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam pemikiran mengenai format bernegara menuju Indonesia Baru Pasca Orde Baru (Era Reformasi) teridentifikasi konsep masyarakat madani yang telah berkembang sebagai alternative pendekatan, karena masyarakat madani berisikan nilai-nilai konsep dasar tertentu yang berguna dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau lebih menyeimbangkan posisi dan peran penentuan yang tetap terasa pada perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Dalam situasi tertentu, memang menjadi tujuan utama dari organisasi masyarakat madani untuk mengungkapkan profil asli dari berbagai parpol. Organisasi tersebut kemudian juga memberikan penerangan kepada para pemilih mengenai perbedaan yang nyata dari partai-partai tersebut. Sedangkan partai politik sendiri berkecenderungan untuk menutup-nutupi kepentingan dan bentuk kebijakan mereka dengan harapan mereka bisa meniongkatkan dukungan dari masyarakat dan pada saat bersamaan mengurangi tingkat pertanggungjawaban mereka.¹⁸

C. Pendidikan Politik Oleh Partai Politik

Di bidang politik Alfian, menjelaskan pembangunan dan pembaharuan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan. Pengertian pertama ialah adanya suatu system ideal yang ingin dicapai. Kedua ialah penilaian bahwa system politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena itu perlu diperbaiki atau diperbarui. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini system politik ideal yang diinginkan itu ialah Demokrasi Pancasila. Lebih lanjut Kaelan, menjelaskan pembangunan dan pembangunan harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subyek negara.

¹⁸ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Friedrich-Ebert-Stiftung ((FES), 2012).

Oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.¹⁹

Kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang diwakili oleh tata kelola partai politik. Masih jauh dari keadaan yang ideal. Pertama, Partai politik yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik masih harus terus berproses dalam menjalankan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kedua, Partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama. Pendidikan Politik seakan tenggelam di antara hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Eksklusivitas dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sentralisme partai politik yang mengabaikan control anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi demokratis di kalangan kandidat dan elite partai politik.²⁰

Partai politik sejatinya memiliki tugas lebih dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik telah menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, namun karena pemahaman mengenai pendidikan politik sangat lentur dan tidak adanya pertanggungjawaban untuk substansinya maka efektivitas program tersebut belum teruji.²¹

Pendidikan politik adalah bagian dari pendidikan sosial pada umumnya. Ia adalah kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam komunitas sosial atau masyarakat. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut, setiap partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Namun dengan tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan watak dari partainya.²²

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut itulah sebabnya, pendidikan politik dilaksanakan untuk

¹⁹ Arif Prasetyo Wibowo dan Cecep Darmawan, Peran Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Wahan Pendidikan Politik Guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PPKN* Vol. 08 No. 01, 2021.

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid.,

²² Ibid.,

memepersiapkan 1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, 2) mendapatkan penyelesaian, dan 3) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Dalam perspektif *good citizen*, pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu warga negara agar ia dapat memperoleh informasi, wawasan dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kesanggupan untuk berpikir kritis guna melawan situasi kondisi yang tidak sehat dan tidak wajar, mampu mengadakan orientasi terhadap diri dan lingkungannya, sehingga mendorongnya untuk menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis.²³

Pendidikan politik menempati posisi penting dalam menentukan efektivitas sebuah system politik. Seperti dikatakan Affandi, “Pendidikan politik tidak saja akan menentukan efektivitas sebuah system politik, karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga memberikan corak kepada kehidupan bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya penerusan nilai-nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan”. Pendidikan politik di Indonesia harus dirumuskan sebagai rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 Sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional; dan sebagai upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya system politik yang demokratis, sehat dan dinamis.²⁴ Sistem politik di Indonesia berdasarkan dasar awal dibuatnya aturan tentang partai politik sudah dikatakan sebagai suatu lembaga yang mendukung perkembangan negara menjadi lebih baik lagi.

D. Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani

Thomas Janoski, berpendapat bahwa partai politik itu merupakan agen penghubung antara masyarakat dengan negara. Partai politik dengan demikian merupakan bagian dari gerakan masyarakat madani. Janoski lebih lanjut memformulasikan bahwa masyarakat madani itu memiliki empat ruang (*sphere*) domain, yaitu *private*, *public*, *state*, dan *market*. Keempat hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam peran masyarakat madani sebagai *check and balances* terhadap kekuasaan dan hegemoni suatu pemerintahan.

Karena itu, Jimly Ashiddiqie memperkuat pendapat di atas dengan pernyataannya bahwa keberadaan suatu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*The degree of institutionalization*) dalam setiap system politik yang demokratis. Bahkan sebagai suatu organisasi, keberadaan parpol bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash dan damai. Ia tidak hanya sebagai instrument demokrasi tapi sekaligus tujuan yang lebih luas yakni

²³ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017), hal 14-15.

²⁴ Ibid., 17-18.

memastikan kedaulatan rakyat atas hak-hak dasarnya, baik itu hak sipil politik maupun ekonomi dan sosial mereka.²⁵

Pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu system politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.²⁶

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.²⁷

Kesimpulan

Partai Politik di Indonesia yang berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan sosial pada umumnya. Ia merupakan kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam komunitas sosial atau masyarakat. Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik.

²⁵ Abu Khaer, *Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra*, *Jurnal at-turas* Vol. 1 No. 2, 2014.

²⁶ Herni Susanti, *Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani*, dimuat di <http://m.batamtoday.com/berita58459-Pendidikan-Politik-Menuju-Masyarakat-Madani.html>

²⁷ Ibid.,

Pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata sebagai bentuk keperdulian partai politik terhadap perkembangan sistem demokrasi. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2009).

Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017).

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017).

Laporan Penelitian INFID No. 3/2014, *Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Injdonesia*, (Studi Kerjasama INFID dan LIPI, 2014).

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977).

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012).

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICEF UIN Syarif Hidayatullah Prenadamedia Group, 2016).

Jurnal Ilmiah

Abu Khaer, Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra, *Jurnal at-turas* Vol. 1 No. 2, 2014.

Arif Prasetyo Wibowo dan Cecep Darmawan, Peran Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Wahana Pendidikan Politik Guna Mengembangkan Nilai-nilai Pancasila, *Jurnal*

Bhineka Tunggal Ika; Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Vol. 08 No. 01, 2021.

Majid, Nurcholish, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Makalah Seminar IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Herni Susanti, *Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani*, dimuat di <http://m.batamtoday.com/berita58459-Pendidikan-Politik-Menuju-Masyarakat-Madani.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.